

International Law Making



Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia

Konsep (*Concept*)

Universal Declaration of Human Rights (selanjutnya disebut Deklarasi Universal HAM) merupakan pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia. Deklarasi tersebut memberikan pengakuan hak-hak dasar manusia. Di dalamnya, dijelaskan bahwa pengakuan atas hak-hak dasar manusia menjadi dasar dari kemerdekaan, keadilan dan perdamaian dunia. Lebih lanjut, dijabarkan bahwa hak-hak asasi manusia perlu dilindungi oleh hukum guna menciptakan kebebasan untuk berbicara, beragama, kebebasan dari ketakutan, dan kekurangan bagi umat manusia.

Majelis Umum PBB mengadopsi Deklarasi Universal HAM sebagai satu standar umum bagi keberhasilan untuk semua bangsa dan negara. Meskipun dokumen aslinya tidak ditujukan untuk memiliki konsekuensi hukum, Deklarasi Universal HAM memiliki pengaruh kuat baik secara langsung maupun tidak langsung kepada hukum yang mengatur hak-hak asasi manusia secara umum.

Latar Belakang (*Background*)

Sejak terungkapnya kekejaman yang dilakukan oleh NAZI pada Perang Dunia II, serta piagam PBB, sebagai kesepakatan masyarakat internasional, tidak secara rinci menyebutkan hak-hak yang dilindungi, maka masyarakat internasional perlu adanya Deklarasi yang menyatakan bahwa hak-hak asasi manusia yang bersifat universal. Berdasarkan Pasal 68 Piagam PBB, ECOSOC memiliki kewajiban untuk membentuk komisi dalam bidang

ekonomi dan sosial serta mendukung masalah hak asasi manusia.¹ Maka itu dibentuklah *United Nations Comissions on Human Rights (UNCHR)*, pada 1947, yang dilanjutkan dengan pertemuan pertama UNCHR. Pertemuan tersebut dihadiri oleh John Peters Humphrey (Kanada), yang pada saat itu menjabat sebagai *Director of the Human Rights Division* PBB, Eleanor Roosevelt (USA), René Cassin dari (Perancis), Charles Malik (Lebanon), dan P.C Chang (China).

Pada 10 November 1948, Majelis Umum PBB mengadopsi Deklarasi Universal HAM dengan hasil voting 48-0, serta abstain dari 8 negara (termasuk diantaranya Blok Uni Soviet, Afrika Selatan, dan Arab Saudi). Dalam perancangan Deklarasi Universal HAM, perbedaan dan pertentangan ideologi menjadi isu hangat. Hal ini disebabkan oleh perang dingin yang terjadi saat itu, sehingga konsekuensinya, Deklarasi Universal HAM terbagi dalam dua bagian, yaitu *economic and social rights* dan *civil and political rights*. Kemudian, pada 1952, diputuskan untuk dibentuk ICCPR dan ICESCR.

Keberlakuan (*Entry into Force*)

Majelis Umum PBB mengadopsi Deklarasi Universal HAM ini pada 10 Desember 1948. Meskipun Deklarasi Universal HAM ini memiliki arti yang sangat penting, namun dari segi hukum, tidak memiliki daya ikat. Meskipun demikian, ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Deklarasi Universal HAM banyak dimasukkan ke dalam hukum nasional negara-negara anggota PBB dan telah menjadi tolak ukur untuk menilai sejauh mana suatu negara melaksanakan hak-hak asasi manusianya. Ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Deklarasi Universal HAM ini dianggap mempunyai nilai sebagai hukum kebiasaan internasional (*Customary International Law*). Sekretaris Jenderal PBB, pada

¹ Isi Pasal 68 Piagam PBB: "*shall set up commissions in economic and social fields and for the promotion of human rights*".

1967, menyatakan bahwa Deklarasi ini telah diadopsi kedalam konstitusi tertulis di 43 negara.

Prinsip – prinsip Umum (*General Principles*)

Prinsip-prinsip dalam Deklarasi HAM antara lain:

1. Pengakuan terhadap martabat dasar (*inherent dignity*) dan hak-hak yang sama dan sejajar (*equal and inalienable rights*) sebagai dasar dari kemerdekaan, keadilan dan perdamaian dunia;
2. Membangun hubungan yang baik antarbangsa;
3. Perlindungan HAM dengan *rule of law*;
4. Persamaan antara laki-laki dan perempuan; dan
5. Kerjasama antara Negara dengan PBB untuk mencapai pengakuan universal terhadap HAM dan kebebasan dasar.

Materi Pokok (*Main Features*)

Deklarasi Universal HAM ini terdiri dari 30 Pasal, yang mengatur mengenai hak-hak asasi yang dimiliki oleh setiap manusia tanpa kecuali. Selain itu, ditentukan juga larangan-larangan demi menjamin perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia. Berikut penjabaran mengenai isi Deklarasi Universal HAM:

1. Setiap orang, sejak dilahirkan, memiliki kebebasan dan memiliki persamaan martabat dan hak (Pasal 1);
2. Setiap orang memiliki hak dan kebebasan yang diatur dalam Deklarasi HAM ini tanpa dibedakan berdasarkan ras, warna, jenis kelamin, bahasa, agama, pendapat politik atau perbedaan pendapat lainnya, kebangsaan atau asal-asal, kekayaan, kelahiran maupun hal lainnya. Lebih lanjut, tidak boleh dilakukan suatu pembedaan yang dilakukan atas dasar politik, status yurisdiksi atau status internasional suatu negara atau berdasarkan wilayah dimana seseorang

berada, baik secara mandiri, berdasarkan kepercayaan, *non-self-governing*, atau berdasarkan pembatasan kedaulatan (Pasal 2);

3. Setiap orang memiliki hak hidup, hak atas kebebasan, dan keselamatan individu (Pasal 3);
4. Setiap orang tidak boleh diperbudak dalam bentuk apapun dan perdagangan budak, dalam segala bentuk, dilarang (Pasal 4);
5. Setiap orang tidak boleh disiksa atau mendapatkan perlakuan dan penghukuman yang tidak manusiawi (Pasal 5);
6. Setiap orang memiliki hak pengakuan yang sama, sebagai pribadi, di hadapan hukum (Pasal 6);
7. Setiap orang memiliki hak yang sama di hadapan hukum dan berhak atas perlindungan hukum tanpa adanya diskriminasi (Pasal 7);
8. Setiap orang memiliki hak untuk mendapatkan bantuan dari pengadilan nasional, yang kompeten dan secara efektif, terhadap setiap pelanggaran hak-hak dasarnya yang dijamin oleh undang-undang (Pasal 8);
9. Tidak seorang pun dapat ditangkap, ditahanan, atau dibuang secara sewenang-wenang (Pasal 9);
10. Setiap orang memiliki hak yang sama untuk melakukan suatu *public hearing* dalam suatu pengadilan mandiri dan terpisah, dalam penentuan hak dan kewajibannya yang didasarkan pada tuntutan pidana yang ditujukan padanya (Pasal 10);
11. Setiap orang yang dituntut secara hukum, memiliki hak untuk dianggap tidak bersalah hingga terbukti bersalah berdasarkan hukum di hadapan pengadilan umum, dimana ia telah mendapatkan hak untuk melakukan pembelaan. Seseorang tidak dapat dianggap bersalah atau dituntut bila melakukan suatu perbuatan, yang berdasarkan hukum

nasional dan hukum internasional, bukan merupakan suatu tindak pidana dan tidak dapat dipidana lebih berat daripada hukuman yang telah dijatuhkan padanya saat perbuatan itu dilakukan (Pasal 11 ayat 1 dan 2);

12. Seseorang tidak dapat, tanpa suatu dasar yang jelas, mendapat intervensi terhadap hal-hal pribadinya, keluarga, rumah maupun korespondensinya, dan juga intervensi terhadap kehormatan dan reputasinya. Setiap orang berhak untuk mendapat perlindungan hukum terhadap setiap intervensi yang terjadi atas dirinya (Pasal 12);
13. Setiap orang berhak untuk bergerak bebas dan bertempat tinggal di dalam negaranya. Setiap orang berhak meninggalkan negaranya serta berhak untuk kembali ke negerinya (Pasal 13 ayat 1 dan 2);
14. Setiap orang berhak untuk mencari dan menikmati suaka di negara lain. Akan tetapi, hak ini tidak dapat diminta bila timbul dari suatu tindak pidana non-politik atau timbul dari tindakan yang bertentangan dengan tujuan serta prinsip PBB (Pasal 14 ayat 1 dan 2);
15. Setiap orang memiliki hak atas kewarganegaraan dan hak tersebut tidak dapat dicabut tanpa suatu alasan yang jelas, serta tidak dapat dilakukan penolakan bila akan dilakukan penggantian kewarganegaraan (Pasal 15 ayat 1 dan 2);
16. Setiap laki-laki dan perempuan dengan usia cukup berhak untuk menikah dan membentuk keluarga tanpa adanya hambatan yang menyangkut ras, kewarganegaraan, atau agama. Masing-masing memiliki hak yang sama dalam perkawinan, selama perkawinan dan pada saat pengakhiran suatu perkawinan. Perkawinan hanya dapat dilaksanakan atas dasar suatu keinginan dan kesepakatan dari para pihaknya. Lebih lanjut, keluarga merupakan suatu kelompok sosial yang alami dan fundamental dan harus mendapatkan perlindungan sosial dari Negara (Pasal 16 ayat 1,2 dan 3);

17. Setiap orang memiliki hak untuk memiliki harta baik sendiri maupun bersama. Tidak seorangpun yang dapat dicabut kepemilikan harta secara sewenang-wenang (Pasal 17 ayat 1 dan 2);
18. Setiap orang memiliki hak kebebasan berpikir, hati nurani dan agama. Hak ini juga meliputi hak untuk mengganti agama atau kepercayaan, serta untuk mengimplementasikan agama atau kepercayaannya pada pengajaran, praktek dan beribadah, baik secara sendiri maupun didalam komunitas dengan orang lain (Pasal 18);
19. Setiap orang berhak untuk memiliki dan mengeluarkan pendapat secara bebas. Hak ini juga meliputi kebebasan untuk memiliki pendapat tanpa campur tangan, serta hak untuk mencari, menerima, dan mengambil informasi maupun ide-ide dari media (Pasal 19);
20. Setiap orang berhak dan bebas untuk berkumpul dan berserikat secara damai. Tidak seorang pun yang dapat dipaksa untuk memasuki suatu perkumpulan (Pasal 20 ayat 1 dan 2);
21. Setiap orang berhak untuk turut serta dalam pemerintahan di negaranya, baik secara langsung maupun melalui wakil-wakil yang dipilih dengan bebas. Setiap orang juga berhak untuk menggunakan pelayanan publik di negaranya. Lebih lanjut, kehendak masyarakat harus menjadi dasar dari kewenangan suatu pemerintah, yang diwujudkan melalui pemilu secara berkala, yang diselenggarakan secara umum, bebas, dan rahasia, atau melalui suatu prosedur voting yang seimbang (Pasal 21 ayat 1,2 dan 3);
22. Setiap orang memiliki hak atas jaminan sosial guna menjamin hak-hak ekonomi dan sosial bagi kesejahteraannya. Hal tersebut dapat diwujudkan melalui usaha nasional dan kerja sama internasional (Pasal 22);
23. Setiap orang berhak atas suatu pekerjaan, memilih pekerjaan, dan mendapatkan jaminan untuk tidak menjadi pengangguran. Selanjutnya, seseorang juga berhak untuk

mendapatkan penghasilan sesuai dengan pekerjaannya, mendapatkan jaminan jumlah upah yang dapat menjamin kehidupannya dan keluarganya, dan berhak untuk ikut serta dalam suatu serikat pekerja guna melindungi kepentingannya (Pasal 23 ayat 1, 2, 3 dan 4);

24. Setiap orang berhak untuk beristirahat, berlibur dan memiliki pembatasan jam kerja, serta mendapatkan libur secara berkala dengan upah tertentu (Pasal 24);
25. Setiap orang berhak untuk hidup dengan standar hidup yang layak bagi dirinya maupun bagi keluarganya, mencakup juga pemenuhan kebutuhan makanan dan minuman, pakaian, perumahan, pelayanan kesehatan serta pelayanan sosial lainnya. Selain itu, adanya jaminan bila dalam keadaan tidak bekerja, sakit, cacat, bercerai, lanjut usia dan lain-lain diluar batas kemampuannya. Baik ibu maupun anak, berhak untuk mendapatkan perlindungan tertentu. Semua anak baik yang lahir di dalam maupun di luar perkawinan, harus mendapatkan perlindungan sosial yang sama (Pasal 25 ayat 1 dan 2);
26. Setiap orang memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan. Bagi pendidikan tingkat dasar, harus dibebaskan dari biaya pendidikan. Bagi pendidikan profesional dan teknis, harus tersedia dan dapat ditempuh oleh setiap orang tanpa terkecuali. Disamping itu, pendidikan harus secara langsung dapat membantu pengembangan diri, memperkuat martabat, dan menjadi dasar fundamental kebebasan seseorang. Pendidikan juga harus dapat menjadi sarana pemahaman, toleransi, dan hubungan persahabatan diantara bangsa-bangsa, dan membantu kegiatan PBB dalam pemeliharaan perdamaian dunia (Pasal 26 ayat 1, 2, dan 3);
27. Setiap orang berhak turut serta dalam kehidupan kebudayaan dalam komunitasnya, menikmati seni, dan membagikan perkembangan ilmu pengetahuan. Selain itu, setiap orang berhak mendapatkan perlindungan

kepentingan moral dan material dari hasil penelitian, hasil kesusasteraan, maupun hasil produksi seni yang dihasilkannya (Pasal 27 ayat 1 dan 2);

28. Setiap orang berhak atas ketertiban sosial dan internasional dengan pemenuhan hak-hak dan kebebasan-kebebasan yang diatur dalam Deklarasi HAM (Pasal 28);
29. Setiap orang memiliki kewajiban terhadap masyarakat tempat dimana ia memperoleh kesempatan untuk mengembangkan pribadinya dengan leluasa. Dalam menjalankan hak-hak dan kebebasan-kebebasannya, setiap orang hanya tunduk pada batasan-batasan yang ditetapkan oleh undang-undang yang menjamin pengakuan serta penghormatan yang layak terhadap hak-hak dan kebebasan-kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi syarat-syarat yang adil dalam hal kesusilaan, ketertiban, dan kesejahteraan umum dalam suatu masyarakat yang demokratis. Hak-hak dan kebebasan-kebebasan ini tidak boleh dilaksanakan secara bertentangan dengan tujuan dan dasar PBB (Pasal 29 ayat 1,2, dan 3); dan

Tidak satu pun ketentuan dalam Deklarasi HAM ini dapat memberikan hak untuk terlibat di dalam kegiatan apa pun atau melakukan perbuatan yang bertujuan untuk merusak hak-hak dan kebebasan-kebebasan yang terdapat didalam Deklarasi ini kepada suatu Negara, kelompok, ataupun seseorang. (Fika Yulialdina Hakim, S.H.)

International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights 1966²

Konsep (Concept)

International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights (Kovenan) merupakan Kovenan yang bertujuan untuk melindungi hak asasi manusia khususnya hak ekonomi, sosial, dan budaya serta menjamin kesetaraannya antarindividu. Kovenan ini dilandasi oleh Piagam PBB (*Charter of the United Nations*) dan Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Rights*) yang telah lebih dahulu mengatur mengenai perdamaian dunia, kesetaraan hak asasi manusia (HAM), dan keadilan bagi seluruh individu. Dengan meratifikasi Kovenan ini, Negara tersebut mempunyai tanggung jawab untuk menerapkan setiap kewajiban yang terkandung di dalamnya dan menjamin pelaksanaan tanggung jawab tersebut dalam hukum nasionalnya.

Latar Belakang (Background)

Dalam hukum humaniter internasional maupun nasional, hak sipil dan politik mendapat lebih banyak perhatian dari masyarakat (publik) daripada hak ekonomi, sosial, dan budaya. Hal ini dikarenakan adanya pandangan yang keliru bahwa hanya hak sipil dan politik, seperti hak untuk mendapat *fair trial*, hak tidak diperlakukan diskriminatif, hak hidup, dan hak memilih, yang dapat menjadi subjek pelanggaran HAM. Hak ekonomi, sosial, dan budaya seringkali dipandang kurang penting atau dianggap sebagai “*second-class rights*.”

Hak ekonomi, sosial, dan budaya telah dikenal oleh masyarakat internasional sejak munculnya *Universal Declaration of*

² http://www.unhchr.ch/html/menu3/b/a_ceschr.htm;
<http://www.hrweb.org/legal/escrsigs.html>;
<http://www.ohchr.org/english/bodies/cescr/>;
<http://www.ohchr.org/english/about/publications/docs/fs16.htm>

Human Rights pada 1948. Sejak saat itu, hak ekonomi, sosial, dan budaya serta hak sipil dan politik menjadi dasar dari hukum humaniter internasional. Pembahasan mengenai hak-hak tersebut terus berkembang hingga Konferensi Dunia tentang HAM 1993 (*World Conference on Human Rights 1993*). Meskipun demikian, hak ekonomi, sosial, dan budaya tidak memperoleh perhatian sebanyak hak sipil dan politik dikarenakan pandangan yang mempertanyakan hak-hak seperti apa yang terdapat dalam hak ekonomi, sosial, dan budaya serta apa pentingnya sehingga suatu Negara harus memperhatikan hak tersebut.

Munculnya hak ekonomi, sosial, dan budaya adalah untuk menjamin perlindungan bagi setiap orang untuk mendapatkan hak, kebebasan, dan keadilan sosial yang berkelanjutan. Menurut *United Nations Development Programme* (UNDP), seperlima populasi dunia menderita kelaparan setiap malam, seperempatnya kurang mendapatkan akses untuk memenuhi kebutuhan dasarnya seperti air bersih, dan sepertiganya tinggal dalam kemiskinan. Oleh karena itu, perhatian serta komitmen terhadap perlunya hak ekonomi, sosial, dan budaya menjadi sesuatu yang tak terelakkan. Inilah yang melatarbelakangi munculnya *International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights* sebagai instrumen hukum internasional mengenai HAM yang paling penting dalam memberikan perlindungan terhadap hak ekonomi, sosial, dan budaya.

Keberlakuan (*Entry into Force*)

Kovenan ini dinyatakan terbuka untuk penandatanganan, ratifikasi, dan aksesinya dalam Resolusi Majelis Umum PBB (*General Assembly Resolution*) 2200A (XXI) 16 Desember 1966. Satu dekade kemudian, Kovenan ini telah berlaku (*entry into force*), tepatnya pada 3 Januari 1976. Hingga 19 September 2006 tercatat 66 Negara Penandatangan dan 154 Negara Peserta atas Kovenan ini. Indonesia telah mengaksesi Kovenan ini pada 23 Februari 2006.

Pasal 27 dari Kovenan ini menyebutkan bahwa Kovenan ini berlaku 3 bulan setelah tanggal pendepositan instrumen ratifikasi atau instrumen aksesinya yang ke-35 kepada Sekretaris Jenderal PBB.

Lebih lanjut, Pasal tersebut menyatakan bahwa bagi tiap Negara yang meratifikasi atau mengaksesi Kovenan ini, setelah pendepositan instrumen ratifikasi atau instrumen aksesi yang ke-35, maka Kovenan ini berlaku 3 bulan setelah tanggal deposit dari masing-masing instrumen ratifikasi atau instrumen aksesi.

Prinsip-prinsip Umum (*General Principles*)

Prinsip umum dalam Kovenan ini adalah hak untuk menentukan nasib diri sendiri (*right of self-determination*). Hal ini tertuang dalam Pasal 1 Kovenan yang menyebutkan bahwa semua orang mempunyai hak untuk menentukan nasib diri sendiri yang dengan hak tersebut mereka bebas menentukan status politiknya dan bebas mengembangkan keadaan ekonomi, sosial dan budayanya. Oleh karenanya, setiap Negara Peserta harus mendorong terlaksananya hak menentukan nasib diri sendiri dan menghargai hak tersebut.

Materi-materi Pokok (*Main Features*)

Dalam Kovenan ini, terkandung beberapa materi yang menjelaskan cakupan dari hak ekonomi, sosial dan budaya, yaitu:

- *Persamaan hak antara pria dan wanita*, bahwa Negara Peserta menjamin persamaan hak antara pria dan wanita dalam menikmati hak ekonomi, sosial dan budayanya (Pasal 3);
- *Hak untuk bekerja*, bahwa Negara Peserta mengakui dan menjamin hak untuk bekerja termasuk hak setiap orang untuk mendapatkan kesempatan memperoleh penghasilan dengan pekerjaan yang ia pilih dan terima dengan bebas (Pasal 6);
- *Hak mendapatkan kondisi pekerjaan yang layak*, Negara Peserta mengakui dan menjamin penghasilan yang layak dan adil tanpa perlakuan diskriminatif, khususnya antara pria dan wanita, dengan penghasilan yang setara dengan pekerjaannya (*equal pay for equal work*). Negara Peserta juga menjamin keamanan

dan keselamatan kerja serta mengatur batas jam kerja, istirahat, libur dan libur nasional (Pasal 7);

- *Hak membentuk dan bergabung dalam badan usaha*, Negara Peserta menjamin hak setiap orang untuk membentuk dan bergabung dalam badan usaha sesuai dengan pilihannya untuk mendukung dan melindungi kepentingan ekonomi dan sosialnya. Ketentuan ini juga mengatur hak untuk berdemonstrasi sepanjang dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku di negara tersebut (Pasal 8);
- *Hak mendapatkan keamanan dan jaminan sosial*, Negara Peserta mengakui hak setiap orang untuk mendapatkan keamanan sosial, termasuk jaminan sosial (Pasal 9).
- *Hak atas perlindungan dan bantuan untuk keluarga*, Negara Peserta mengakui perlindungan dan bantuan seluas-luasnya kepada keluarga sebagai kelompok dasar dari suatu masyarakat, khususnya perawatan dan pendidikan anak-anak. Pernikahan harus dilaksanakan dengan *free consent* dari kedua mempelai. Perlindungan khusus harus diberikan kepada ibu yang berada pada masa sebelum dan setelah melahirkan. Anak-anak dan remaja harus dilindungi dari eksploitasi ekonomi dan sosial. Negara juga harus mengatur batas usia kerja sehingga pekerjaan yang menggunakan buruh anak dapat dilarang dan diberikan hukuman (Pasal 10);
- *Hak mendapatkan standar hidup yang layak*, Negara Peserta mengakui dan menjamin hak setiap orang untuk mendapatkan standar hidup yang layak baik bagi dirinya sendiri maupun bagi keluarganya, termasuk kelayakan pangan, sandang dan papan, dan kelanjutan perkembangan hidupnya (Pasal 11);
- *Hak mendapatkan standar terbaik untuk kesehatan jasmani dan mental*, Negara Peserta mengakui hak setiap orang untuk menikmati standar terbaik untuk kesehatan jasmani dan mental. Guna menjamin pelaksanaan hak ini, Negara harus mengambil langkah-langkah yaitu mengatur pengurangan angka kematian bayi, meningkatkan kebersihan lingkungan, mencegah dan

mengendalikan virus epidemik, endemik dan lainnya, serta menjamin pelayanan medis (Pasal 12);

- *Hak memperoleh pendidikan*, Negara Peserta mengakui hak setiap orang untuk mendapatkan pendidikan. Negara-negara Peserta bersepakat bahwa pendidikan harus dapat membuat semua orang berpartisipasi dalam masyarakat, mendorong toleransi dan persahabatan antarbangsa, ras, etnis dan antar umat beragama untuk menciptakan perdamaian. Guna menjamin pelaksanaannya, pendidikan primer harus diwajibkan dan bebas biaya, pendidikan sekunder dan pendidikan yang lebih tinggi harus mudah dijangkau oleh semua orang (Pasal 13 dan Pasal 14);
- *Hak untuk hidup berbudaya dan menikmati keuntungan keilmuan*, Negara Peserta mengakui hak setiap orang untuk turut serta dalam kehidupan berbudaya, menikmati keuntungan keilmuan dan penerapannya, dan menikmati perlindungan moral dan kepentingan materi atas hasil dari suatu keilmuan, sastra atau produk seni yang diciptakannya (Pasal 15).

Mekanisme Khusus (*Specific Mechanism*)

Dalam Kovenan ini diatur bahwa Negara Peserta memberikan laporan dari langkah-langkah yang telah diambil dan perkembangannya. Semua laporan tersebut harus dikumpulkan kepada Sekretaris Jenderal PBB yang kemudian akan diberikan salinannya kepada *Economic and Social Council (ECOSOC)*. Sekretaris Jenderal PBB juga memberikan salinan laporan tersebut kepada badan-badan khusus PBB (*specialized agencies*).

Negara Peserta juga harus memberikan laporan secara bertahap mengenai program yang harus dibentuk oleh ECOSOC dalam satu tahun keberlakuan Kovenan ini setelah konsultasi dengan Negara Peserta dan badan khusus terkait. Laporan tersebut dapat berisi faktor-faktor dan kesulitan dari Negara Peserta dalam melaksanakan hak-hak yang diatur dalam Kovenan.

ECOSOC dapat mengatur suatu pertemuan dengan badan-badan khusus guna membahas laporan perkembangan yang telah dicapai sesuai dengan lingkup aktivitasnya. Laporan ini dapat terdiri dari keputusan dan rekomendasi atas pelaksanaan yang telah dilakukan oleh badan atau organ yang berkompeten. ECOSOC dapat mengalihkan laporan HAM yang telah diberikan oleh Negara-negara Peserta kepada Komisi HAM (*Commission on Human Rights*) untuk dipelajari dan diberikan rekomendasi atau sebagai informasi. Hal ini diatur dalam Pasal 16 sampai dengan Pasal 19 Kovenan.

Otoritas atau Pengawasan (*Authority*)

Badan yang bertugas mengawasi pelaksanaan dari Kovenan ini ialah *Committee on Economic, Social and Cultural Rights* (Komite). Komite ini dibentuk oleh *Economic and Social Council* (ECOSOC) pada 1985. Pertemuan pertama Komite ini diadakan pada 1987 dan telah melangsungkan 14 sesi pertemuan. Pertemuan diselenggarakan setiap dua kali setahun, biasanya pada bulan Mei dan November/Desember dan dilangsungkan di Markas PBB di Jenewa. Komite ini terdiri dari 18 anggota yang memiliki keahlian di bidang HAM. Para anggota Komite dipilih oleh ECOSOC untuk masa tugas 4 tahun dan dapat dipilih kembali. Komite ini merupakan organ tambahan (*subsidiary organ*) dari ECOSOC dan memperoleh otoritas formal dari ECOSOC.

Fungsi utama Komite ialah untuk memonitor pelaksanaan Kovenan ini melalui Negara-negara Pesertanya. Komite juga berupaya meningkatkan dialog antar-Negara Peserta dan memantau sejauh mana ketentuan-ketentuan dalam Kovenan ini diterapkan oleh Negara Peserta. Komite juga dapat membantu Pemerintah dari Negara Peserta dalam memenuhi kewajibannya atas Kovenan ini dengan mengusulkan kebijakan, saran, dan rekomendasi agar hak ekonomi, sosial, dan budaya dapat dilaksanakan dengan efektif.

Peraturan Lain Terkait

Kovenan ini terkait dengan Piagam PBB dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Sebagaimana diutarakan sebelumnya bahwa kedua instrumen inilah yang melandasi lahirnya Kovenan ini. Hingga saat ini, Komite masih melakukan pembahasan mengenai rancangan protokol tambahan (*optional protocol*) yang mengatur mengenai hak baik individu maupun grup untuk mengajukan klaim atau tuntutan atas pelanggaran hak ekonomi, sosial dan budaya. (Nyiayu Kurnia A., S.H.)

International Covenant on Civil and Political Rights³

Konsep (Concept)

International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), yang untuk selanjutnya disebut dengan Kovenan), merupakan Kovenan yang mengatur tentang hak-hak sipil dan politik seseorang. Berdasarkan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (*United Nations Charter*) dan Deklarasi Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Rights*), hak-hak ini telah diakui, namun dalam pelaksanaannya harus tetap memperhatikan hak-hak orang lain dan keadaannya memungkinkan untuk melaksanakan hak tersebut. Tujuan dari dibuatnya Kovenan ini adalah untuk menjamin terpenuhinya hak-hak sipil dan politik seseorang, dimana setiap orang memperoleh hak yang sama dan seimbang, serta dapat menikmati hak-hak tersebut tanpa ada tekanan. Selain itu, Kovenan ini merupakan salah satu bentuk promosi bagi penghormatan universal dalam pelaksanaan kemerdekaan seseorang dan hak asasi manusia (HAM).

³ <http://www.hrweb.org/legal/cpr.html>.
http://en.wikipedia.org/wiki/International_Covenant_on_Civil_and_Political_Rights

Latar Belakang (*Background*)

Kovenan ini dibentuk pertama kali pada 1966 dan dibuat berdasarkan *Universal Declaration of Human Rights* (untuk selanjutnya disebut dengan Deklarasi). Deklarasi tersebut mengusung kedua paham HAM yang berkembang pada awalnya, baik itu dari generasi pertama ataupun generasi kedua. Generasi pertama adalah HAM yang mencakup hak-hak sipil dan politik, sedangkan generasi kedua adalah HAM yang mencakup hak-hak ekonomi, sosial dan budaya.⁴ Pada prakteknya, deklarasi tersebut ternyata belum mampu menyatukan paham-paham yang terdapat di dunia, sehingga tercipta suatu kesepakatan internasional mengenai perlunya dibentuk sebuah Kovenan dengan keberlakuan mengikat yang diharapkan lebih mampu memberikan perlindungan terhadap HAM secara lebih terpadu.

Pada dasarnya, kesepakatan tersebut tercipta juga karena keadaan pada saat itu, dimana negara-negara kapitalis memiliki paham yang berbeda dengan negara-negara komunis. Amerika Serikat sebagai motor penggerak dari negara-negara kapitalis, lebih terfokus pada hak-hak sipil dan politik, sedangkan negara-negara

⁴ Pembagian hukum hak asasi manusia ke dalam tiga generasi pertama kali dilakukan oleh Karel Vasak, seorang ahli hukum Republik Ceko di *International Institute of Human Rights Strasbourg*. Pembagian hak asasi manusia ke dalam tiga generasi ini mengikuti semboyan Revolusi Perancis, yaitu *liberty, fraternity, equality*. Hak-hak asasi pada generasi pertama merupakan hak sipil dan politik, yang bertujuan melindungi seorang warga negara dari beban negaranya. Hak yang termasuk didalamnya adalah kebebasan berbicara, hak diadili secara adil, kebebasan beragama, dan hak memilih. Hak-hak asasi generasi kedua berhubungan dengan kesamaan kedudukan, yang dikenal pertama kali setelah Perang Dunia I. Pada pokoknya, hak asasi generasi kedua mengatur tentang hak ekonomi, sosial dan budaya, antara lain seperti hak untuk memperoleh penghidupan yang layak, hak atas pekerjaan, pendidikan, dan jaminan kesejahteraan lainnya. Terakhir, hak-hak asasi generasi ketiga, pada dasarnya tidak memiliki pengertian yang pasti, banyak ahli hukum yang mengartikannya sebagai hak yang terdapat dalam area abu-abu, antara hak sipil dan hak sosial. Salah satu contoh hak-hak generasi ketiga adalah hak-hak kolektif dan kelompok, hak pembangunan sosial dan ekonomi, hak mewarisi kebudayaan, serta hak memperoleh pembangunan yang berkelanjutan.

komunis lebih terfokus pada hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya. Dalam rangka mengatasi hal tersebut, maka diciptakanlah dua Kovenan yang berbeda, yaitu ICCPR dan *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights*.

Keberlakuan (*Entry into force*)

Kovenan ini berlaku pada 23 Maret 1976. Berdasarkan Pasal 49, Kovenan ini mulai berlaku 3 (tiga) bulan setelah tanggal penyimpanan ke-55 (lima puluh lima) instrumen ratifikasi atau aksesi kepada Sekretaris Jenderal PBB. Hingga saat ini, Kovenan telah diratifikasi oleh 155 negara peserta. Indonesia telah meratifikasi Kovenan melalui Undang-Undang No. 12 Tahun 2005, pada 28 Oktober 2005. Sesuai dengan ketentuan pada Kovenan, bagi Indonesia yang baru menyerahkan instrumen pengesahannya pada 23 Februari 2006, maka Kovenan baru berlaku efektif 23 Mei 2006 lalu.

Prinsip Umum (*General Principles*)

Dalam Kovenan ini, terdapat beberapa prinsip umum yang pada dasarnya telah diterima secara luas di dunia internasional. Pada Pasal 1 dinyatakan bahwa seluruh manusia memiliki hak untuk menentukan nasibnya sendiri, sebagaimana prinsip ini tercantum dalam *United Nations Charter*. Hak tersebut meliputi kebebasan untuk menentukan status politik dan kebebasan memperoleh perkembangan ekonomi, sosial dan budaya. Negara peserta Kovenan juga harus mempromosikan perwujudan dari hak menentukan nasib sendiri tersebut, serta menghormati keberadaan hak tersebut sebagaimana ditentukan dalam *United Nations Charter*. Pernyataan ini dinyatakan secara jelas pada Pasal 1 Ayat 3 dari Kovenan.

Prinsip umum lain tercantum dalam Pasal 26 yang menyebutkan bahwa setiap orang memiliki kedudukan yang sama dalam hukum, tanpa ada diskriminasi antara yang satu dengan yang lainnya dalam memperoleh perlindungan hukum. Oleh karena itu,

suatu hukum harus melarang segala bentuk diskriminasi yang didasarkan pada suatu ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pendapat politik, asal kebangsaan atau status sosial, kepemilikan, atau status kelahiran.

Materi Pokok (*Main Features*)

Adapun materi-materi pokok yang terdapat dalam Kovenan ini, termuat dalam keenam bab dan 53 Pasal yang dimilikinya. Materi-materi pokok tersebut antara lain:

- Pasal 2 menyatakan bahwa setiap negara peserta diwajibkan untuk menghormati setiap hak yang dimiliki warga negara yang berada di wilayahnya, dan merupakan subyek dari yurisdiksi negara tersebut. Oleh sebab itu, negara peserta Kovenan ini, diwajibkan untuk mengambil langkah/tindakan yang dianggap perlu dalam rangka menjamin terlaksananya hak-hak tersebut. Apabila hukum negara tersebut belum mengatur klausa mengenai langkah tersebut, maka negara peserta wajib tunduk pada ketentuan yang terdapat dalam Kovenan. Ayat 3 mewajibkan kepada setiap negara peserta untuk memastikan bahwa seseorang yang kebebasan atau haknya terlanggar, maka kepadanya diberikan penggantian yang efektif (kecuali pelanggaran tersebut dilakukan oleh orang-orang yang bertindak dalam kapasitas jabatan), dimana bentuk hak penggantian tersebut ditentukan oleh otoritas administratif dan legislatif yang berwenang. Harus dipastikan pula bahwa otoritas yang berwenang tersebut benar-benar melaksanakan penggantian tersebut ketika dikabulkan.
- Negara Peserta harus memastikan adanya persamaan hak antara laki-laki dengan perempuan dalam pelaksanaan hak sipil dan politik sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Kovenan (Pasal 3). Bilamana terdapat keadaan dimana keamanan nasional suatu negara terancam, maka suatu negara dapat bertindak diluar/menyimpang dari kewajiban yang ditentukan dalam Kovenan, selama tindakan tersebut tidak melanggar

kewajiban mereka dalam hukum internasional dan tidak melibatkan diskriminasi dalam bentuk apapun (Pasal 4).

- Dalam Kovenan juga dinyatakan, tidak diperbolehkan terdapat peringanan dari pasal-pasal tertentu, yaitu pada Pasal 6, 7, 8 Ayat 1 dan 2, 11, 15, 16, 18. Kepada setiap negara yang melakukan penyimpangan terhadap kewajiban dalam Kovenan ini, wajib memberitahukan negara peserta lain, melalui Sekretaris Jenderal PBB. Pemberitahuan ini termasuk pula pasal mana yang hendak disimpangi, beserta alasannya (Pasal 4 Ayat 3).
- Pasal 5 mengatur bahwa tidak satupun ketentuan dalam Kovenan yang dapat diartikan memberikan pengaturan kepada suatu negara, kelompok, atau seseorang untuk melakukan perbuatan yang bertujuan untuk menghancurkan hak dan kebebasan yang diakui dalam ketentuan Kovenan ini. Tidak diperbolehkan terdapat penyimpangan atau larangan terhadap hak-hak asasi manusia yang diakui atau dikenal sebelumnya di setiap negara peserta berdasarkan hukum, konvensi, peraturan atau kebiasaan, meski hak tersebut belum atau tidak dikenal dalam Kovenan ini.
- Pasal 6 mengatur mengenai hak setiap manusia untuk hidup. Hak ini merupakan hak yang paling asasi, untuk itu dilindungi oleh hukum dan tidak ada seorang pun yang dapat mengambil hak tersebut (Ayat 1). Negara-negara yang belum mempunyai hukuman mati, hanya diperbolehkan menggunakan hukuman mati tersebut bilamana seseorang dinyatakan telah melakukan kejahatan berat dan pelaksanaan hukuman tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan di dalam Kovenan ini dan *Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide* (Ayat 2). Bilamana hukuman mati telah dijatuhkan terhadap seseorang, maka kepadanya diperbolehkan mencari dasar alasan untuk menghindarkan diri dari hukuman tersebut, dan alasan tersebut dapat diberikan terhadap kasus apapun. Hukuman mati pun tidak boleh dilaksanakan terhadap seseorang di bawah usia 18 tahun atau ibu yang sedang mengandung (Ayat 3 dan 4).

- Pasal 7 menyatakan bahwa tidak ada seorang pun yang dapat dijadikan subyek penyiksaan, perlakuan atau hukuman keji, direndahkan dan diperlakukan dengan tidak berperikemanusiaan. Tidak pula seseorang, tanpa kesediaannya, menjadi subyek eksperimen medis dan sains. Pada Pasal 8 dinyatakan bahwa tidak seorang pun dapat diperbudak karena segala bentuk perbudakan dan perdagangan budak dilarang (Ayat 1). Tidak pula seseorang diperbolehkan dikekang kebebasannya (Ayat 2). Pada Ayat 3 dinyatakan bahwa seseorang tidak diperbolehkan bekerja secara paksa, namun bila suatu negara melaksanakan hukuman kerja paksa terhadap pelaku kejahatan, maka hukuman tersebut dapat dibenarkan apabila hukuman itu dijatuhkan oleh pengadilan yang berwenang.
- Pasal 9 dan 10 menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan dan rasa aman. Dalam hal seseorang ditahan (kebebasannya) karena melakukan suatu kejahatan, maka kepadanya harus dibacakan tuntutan, alasan penahanan, sekaligus hak-haknya, serta kepadanya berhak memperoleh pengadilan yang seadil-adilnya. Setiap orang yang ditahan berhak memperoleh perlakuan yang sesuai dengan kemanusiaan dan dihormati hak-hak asasinya. Dalam penahanan tersebut, harus dibedakan antara penahanan terhadap tertuduh tindak kejahatan dengan pelaku tindak kejahatan, juga dibedakan antara penjara anak-anak dengan penjara orang dewasa (Pasal 10 Ayat 2).
- Pasal 11 menyatakan bahwa tidak seorang pun dapat dimasukkan ke dalam penjara semata-mata karena ketidakmampuannya memenuhi kewajibannya dalam berkontrak.
- Pasal 12 menyatakan bahwa setiap orang bebas menentukan tempat tinggal sehari-harinya, juga berhak untuk meninggalkan negara manapun, kecuali dilarang menurut hukum.
- Setiap orang memiliki kedudukan yang sama dihadapan pengadilan dan tribunal (Pasal 14), untuk itu setiap orang

berhak atas dengar pendapat (*public hearing*) dan diadili seadil-adilnya dihadapan tribunal/pengadilan yang berkompeten dan independen berdasarkan hukum. Pada Ayat 2 dinyatakan bahwa seorang tertuduh atas suatu perbuatan/tindak kriminal, harus dipandang tidak bersalah hingga ia benar-benar terbukti bersalah menurut hukum (asas *presumption of innocence*). Setiap orang memiliki kesamaan hak dan jaminan untuk:

- a. Mendapat informasi/pemberitahuan secara terperinci mengenai tuduhan yang disangkakan kepadanya dan alasan penahanannya, dalam bahasa yang ia mengerti;
- b. Memperoleh waktu dan fasilitas yang cukup untuk pembelaan dirinya;
- c. Memperoleh persidangan sesegera mungkin tanpa ada penundaan;
- d. Memperoleh kesempatan untuk membela dirinya baik secara langsung (oleh dirinya), maupun dengan bantuan (dari kuasa hukumnya);
- e. Memperoleh kemudahan dalam menelaah saksi-saksi yang meringankan hukumannya;
- f. Memperoleh bantuan seorang penerjemah bilamana tertuduh tidak mengerti bahasa yang digunakan dalam persidangan;
- g. Memperoleh jaminan untuk tidak bersaksi melawan dirinya sendiri, atau dengan kata lain dipaksa mengaku bersalah.

Terhadap suatu putusan hakim, seseorang berhak mengajukan banding ke hadapan pengadilan yang tingkatannya lebih tinggi (Ayat 6). Bilamana seseorang telah dijatuhkan putusan/hukuman terhadap suatu kasus, maka kepada kasus yang sama tidak dapat diadili kembali (Ayat 7).

- Pasal 16 menjelaskan bahwa setiap orang memiliki hak untuk memperoleh pengakuan dihadapan hukum sebagai suatu pribadi hukum dimanapun ia berada. Sedangkan Pasal 17 mengatakan bahwa tidak seorang pun dapat dicampuri kehidupan pribadinya. Hak seseorang untuk memperoleh kebebasan

berpikir dan beragama diatur dalam Pasal 18 Ayat 1. Ayat 2 menjelaskan bahwa kebebasan memilih agama dan kepercayaan ini termasuk kebebasan dalam melaksanakan dan mempraktekkan ajaran agama, serta menyebarkan ajaran agama dan kepercayaan yang dianutnya.

- Kebebasan mengeluarkan pendapat dan mengemukakan pendapat secara lisan maupun tulisan diatur di Pasal 19. Setiap pendapat yang dikeluarkan oleh seseorang diikuti dengan tanggung jawab tertentu. Batasan dalam kebebasan berpendapat itu terletak pada:
 - a. Bilamana pendapat seseorang menyangkut hak dan reputasi orang lain;
 - b. Bilamana pendapat seseorang dapat mengancam ketertiban umum dan keamanan nasional suatu negara.

Pasal 20 mengatur bahwa segala bentuk propaganda perang merupakan bentuk perbuatan yang dilarang berdasarkan hukum.

- Pasal 22 mengatur bahwa merupakan hak setiap orang untuk berkumpul, berserikat (bergabung) dan membentuk suatu perserikatan/kelompok yang melindungi kepentingan-kepentingan golongan tertentu. Pembatasan terhadap klausa ini adalah bilamana suatu perserikatan dapat mengancam keamanan nasional suatu negara (Ayat 2). Pasal 23 mengatur mengenai unit terkecil dalam masyarakat yang disebut sebagai keluarga. Setiap keluarga berhak atas perlindungan hukum dari masyarakat sekitarnya dan dari negara. Hak perempuan dan laki-laki untuk menikah diakui di suatu negara, dengan syarat adanya persetujuan dari kedua pihak. Oleh karena itu, negara berkewajiban mengambil langkah-langkah yang diperlukan dalam rangka menjamin hak-hak dan kewajiban setiap pasangan menikah, dan bilamana pernikahan tersebut tidak berlangsung mulus, maka negara berkewajiban melindungi kepentingan dan hak anak (Pasal 23 Ayat 2-4).
- Pasal 24 mengatur mengenai hak setiap anak, yaitu berhak atas perlindungan hukum tanpa ada diskriminasi. Setiap anak yang

baru lahir wajib untuk didaftarkan dan berhak atas sebuah nama serta kewarganegaraan (Ayat 3).

- Pasal 25 mengatur mengenai hak setiap warga negara untuk memiliki kesempatan dalam:
 - a. Turut serta dalam urusan/kegiatan umum, baik secara langsung maupun tidak langsung, baik diwakili maupun tidak;
 - b. Memilih dan dipilih dalam pemilihan umum;
 - c. Memiliki akses terhadap layanan publik di negaranya.
- Pasal 26 mengatur bahwa setiap orang memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum, tanpa ada diskriminasi. Negara menjamin perlindungan hukum yang efektif dan seimbang atas segala bentuk perlakuan diskriminatif.

Mekanisme Khusus (*Specific Mechanism*)

Kovenan ini memiliki mekanisme khusus, sebagaimana diatur dalam Pasal 28-39, mengenai pembentukan *Human Rights Committee* (selanjutnya disebut Komite). Komite ini terdiri atas 18 anggota yang berasal dari Negara-negara Peserta Kovenan. Kedelapanbelas anggota Komite merupakan orang-orang yang memang telah dikenal baik moralnya dan berkompeten di bidang hak asasi manusia. Anggota Komite dipilih dari daftar orang-orang yang berkompeten dan yang telah dinominasikan oleh Negara Peserta Kovenan. Setiap Negara dapat menominasikan sebanyak-banyaknya 2 orang, yang merupakan warga negaranya, dan dapat dinominasikan kembali pada pemilihan berikutnya.

Mekanisme pemilihannya dilakukan dengan cara:

- Pembentukan Komite ini selambat-lambatnya 6 bulan setelah berlakunya Kovenan ini. Sekretaris Jenderal PBB pada 4 bulan sebelum tanggal pemilihan, memberikan undangan kepada tiap negara untuk memberikan daftar nama orang yang dinominasikan.

- Satu bulan setelah itu, Sekretaris Jenderal menyiapkan daftar orang-orang yang telah dinominasikan, untuk kemudian diberikan kembali ke setiap negara peserta. Pemilihan anggota Komite dilakukan pada pertemuan negara-negara peserta Kovenan, yang dilakukan oleh Sekretaris Jenderal PBB di Markas Besar PBB. Dalam pertemuan itu, dua per tiga dari negara peserta harus hadir dalam rangka memenuhi kuorum.
- Nominasi anggota Komite yang terpilih harus memenuhi suara mayoritas. Setiap anggota Komite terpilih untuk masa jabatan 4 tahun. Mereka dapat dipilih kembali bila dicalonkan lagi. Namun, 9 orang anggota Komite yang terpilih pada pemilihan pertama akan habis masa jabatannya setelah 2 tahun, dan segera setelah pemilihan pertama ini kesembilan nama anggota Komite akan dipilih melalui undian oleh ketua persidangan.
- Bilamana anggota Komite ada yang meninggal atau mengundurkan diri maka harus diberikan pemberitahuan kepada Sekretaris Jenderal agar segera dilakukan pemilihan untuk penggantinya. Secara berkala, anggota Komite melakukan pertemuan di Markas Besar PBB atau di Kantor PBB di Jenewa.

Fungsi dari Komite antara lain menerima laporan mengenai implementasi klausa Kovenan yang diadopsi oleh Negara Peserta (termasuk kendala dan faktor yang mempermudah implementasi Kovenan ini) dan laporan berkala pada tahun pertama sejak Kovenan ini berlaku dari setiap Negara Peserta (Pasal 40 Ayat 1). Seluruh laporan diserahkan melalui Sekretaris Jenderal PBB, untuk kemudian dijadikan dasar pertimbangan anggota Komite.

Mekanisme khusus yang terdapat dalam Kovenan ini diatur pula dalam Pasal 42 yaitu bilamana penyelesaian sengketa oleh Komite tidak diperoleh solusi/jalan keluar yang baik, maka dibentuk *Conciliation Commission ad hoc* (selanjutnya disebut sebagai Komisi). Atas dasar itikad baik, Komisi ini berfungsi untuk menyelesaikan sengketa secara damai. Anggota Komisi terdiri atas 5 orang yang diterima baik oleh negara-negara yang bersengketa. Bilamana negara-negara ini dalam 3 bulan tidak dapat bersepakat mengenai anggota Komisi, maka Komite dapat memilih dari

anggotanya sendiri untuk duduk dalam keanggotaan Komisi. Komisi berhak memilih ketua dan peraturan yang digunakan dalam prosedur penyelesaian sengketa. Anggota Komisi mengadakan pertemuan secara berkala di Markas Besar PBB atau di Kantor PBB di Jenewa, atau di tempat lain yang telah disepakati.

Badan Pengawas (*Authority*)

Komite sebagaimana diatur dalam Pasal 28 berfungsi melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan yang terdapat dalam Kovenan ini. Dalam Pasal 41 dan 42, dinyatakan bahwa Komite berhak mengkomunikasikan kepada Negara yang tidak memenuhi kewajiban dalam Kovenan, berdasarkan pengaduan dari Negara Peserta lain.

Penyelesaian Sengketa (*Settlement of Disputes*)

Pasal 41 Kovenan mengatur bahwa setiap saat, suatu Negara Peserta dapat mendeklarasikan bahwa Komite memiliki kompetensi untuk menerima dan mempertimbangkan untuk mengkomunikasikan dengan Negara Peserta lain, terhadap permasalahan yang diadukannya, bilamana negara yang terakhir ini tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Kovenan. Deklarasi kompetensi Komite penting hakikatnya karena tanpa deklarasi tersebut, maka Komite tidak memiliki kompetensi untuk menyelesaikan sebuah persengketaan. Komite hanya dapat menyelesaikan sengketa apabila tidak ada lagi penyelesaian hukum lain yang dapat ditempuh.

Apabila kompetensi telah diperoleh Komite, maka Komite mengadakan pertemuan tertutup untuk mempelajari masalah tersebut. Dalam menyelesaikan persengketaan, Komite terlebih dahulu menggunakan itikad baik dalam memberikan solusi terbaik berdasarkan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagaimana diatur dalam Kovenan. Bilamana tidak diperoleh solusi, maka Komite dapat memanggil Negara-negara Peserta yang bersengketa, untuk memberikan informasi yang dibutuhkan. Setelah

jangka waktu 12 bulan sejak Komite memperoleh deklarasi kompetensi terlampaui, maka Komite wajib memberikan laporan mengenai solusi apa yang telah dicapai oleh Negara Peserta yang bersengketa. Jika tidak tercapai kata sepakat atau jalan keluar, maka dicantumkan pernyataan singkat mengenai fakta, tuntutan tertulis dan lisan serta jawaban tertulis dan lisan dari negara-negara yang bersengketa.

Ketentuan dalam Pasal 42 mengatur tentang pembentukan Komisi berdasarkan itikad baik untuk memberikan solusi bagi Negara-negara Peserta yang bersengketa. Pada Ayat 6 dinyatakan bahwa Komisi dapat memanggil negara-negara yang bersengketa untuk memberikan informasi yang diperlukan. Setelah Komisi telah mempertimbangkan masalah yang disengketakan, dalam waktu 12 bulan, akan diberikan laporan kepada Ketua Komisi untuk mengkomunikasikan kepada pihak-pihak yang bertikai. Apabila Komisi tidak dapat melengkapi pertimbangan terhadap masalah ini dalam waktu 12 bulan, maka Komisi harus memberikan pernyataan singkat mengenai status dari pertimbangan tersebut. Namun, apabila Komisi berhasil memberikan solusi yang baik bagi kedua pihak yang bersengketa, maka dalam laporan tersebut diberikan pernyataan singkat mengenai fakta-fakta, keadaan kasus, dan solusi yang telah dicapai. Apabila solusi tersebut belum tercapai, maka dalam laporannya, Komisi melaporkan seluruh penemuannya terkait dengan kasus, seluruh pertanyaan yang berkaitan dengan masalah yang disengketakan oleh para pihak, dan memberikan rekomendasi solusi terbaik apa kiranya yang dapat dicapai berkaitan dengan masalah tersebut.

Peraturan Lain yang Terkait (*Related Document*)

Peraturan lain yang erat kaitannya dengan Kovenan ini adalah Piagam PBB, Pasal 2 yang mengatur mengenai hak untuk menentukan nasib sendiri suatu bangsa maupun perorangan. Peraturan lain adalah *Declaration of Human Rights*, yang didalamnya mengatur mengenai hak-hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan dasar setiap manusia. Selain itu, Kovenan ini

dilengkapi dengan *Optional Protocol to the International Covenant on Civil and Political Rights* dan *Second Optional Protocol to the International Covenant on Civil and Political Rights, aiming at the abolition of the death penalty*. Protokol yang pertama berisikan ketentuan mengenai mekanisme komplain, yang dikenal dengan istilah mengkomunikasikan antar pihak yang bertikai, untuk ditelaah oleh Komite. Ketentuan dalam protokol yang pertama ini menciptakan yurisprudensi paling kompleks di dalam sistem Hukum Hak Asasi Manusia Internasional PBB. Sedangkan, protokol yang kedua mengatur tentang abolisi hukuman mati. (Sindy Fathan, S.H.)

Second Optional Protocol, to the International Covenant on Civil and Political Rights, Aiming at the Abolition of Death Penalty⁵

Konsep (Concept)

Second Optional Protocol, to the International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), Aiming at the Abolition of Death Penalty (selanjutnya disebut Protokol) merupakan instrumen khusus yang diciptakan untuk lebih menghargai hak untuk hidup dengan cara menghapuskan hukuman mati. Hak untuk hidup, seperti dinyatakan dalam Pasal 3 Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia dan Pasal 6 ICCPR (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik), merupakan hak yang melekat pada setiap manusia. Meskipun demikian, kedua instrumen tersebut masih memungkinkan dilaksanakannya hukuman mati bagi tindak kejahatan yang sangat serius dan didasarkan pada keputusan akhir pengadilan yang berwenang. Berdasarkan hal tersebut, Protokol ini dibuat untuk menghapuskan hukuman mati di Negara-negara Pihak sebagai langkah maju dari pengakuan hak atas hidup.

⁵ <http://www.ohchr.org>

Latar Belakang (*Background*)

Berbeda dengan *First Optional Protocol to the ICCPR* yang memuat ketentuan prosedural laporan perorangan yang merasa hak-hak sipil dan politiknya dilanggar oleh Negara Pihak, Protokol ini memuat ketentuan material yaitu kewajiban untuk menghapuskan hukuman mati. Pada awalnya, yaitu pada saat dibuatnya Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia, permasalahan mengenai penghapusan hukuman mati belum dibahas. Baru saat ICCPR dibuat, kedudukan hukuman mati sebagai pengecualian dari hak untuk hidup diperhatikan. Ketika itu, dibuat ketentuan dalam Pasal 6 ICCPR bahwa hukuman mati tidak boleh dilaksanakan bagi anak yang berusia di bawah 18 tahun dan pada wanita yang sedang mengandung. Di sisi lain, upaya-upaya untuk menghapuskan hukuman mati terus berjalan, dengan mendasarkan bahwa penghapusan hukuman mati dapat meningkatkan martabat manusia dan memajukan hak asasi manusia secara pesat.

Draf pertama Protokol diajukan pada Majelis Umum PBB tahun 1980. Draf tersebut disponsori oleh Austria, Costa Rica, Republik Dominika, Jerman, Itali, Portugal dan Swedia. Akhirnya pada 1989 draf terakhir Protokol diadopsi oleh Majelis Umum PBB pada sesi ke-44 melalui Resolusi Majelis Umum 44/128 dengan 59 suara mendukung, 26 menentang, dan 48 abstain. Negara-negara yang menentang adalah Amerika Serikat, Cina, Jepang, dan Negara-negara Islam.

Keberlakuan (*Entry into Force*)

Protokol berlaku tiga bulan setelah pendepositan kepada Sekretaris Jenderal PBB instrumen ratifikasi atau aksesi yang kesepuluh (Pasal 8 Ayat 1). Bagi negara yang meratifikasi atau mengaksesi setelah tanggal keberlakuannya, maka bagi negara tersebut Protokol berlaku tiga bulan setelah pendepositan instrumen ratifikasi atau aksesi negara tersebut (Pasal 8 Ayat 2).

Protokol mulai berlaku pada 11 Juli 1991. Hingga saat ini, terdapat 57 Negara Pihak pada Protokol. Beberapa Negara Pihak juga telah melakukan reservasi berdasarkan Pasal 2 ayat (1)

Protokol, diantaranya adalah Azerbaijan, Syprus, Yunani, dan Malta, dimana negara-negara tersebut masih memberlakukan hukuman mati untuk kejahatan militer yang sangat serius yang dilakukan pada saat perang.

Prinsip-prinsip Umum (*General Principles*)

Protokol hanya memuat ketentuan untuk menghapuskan hukuman mati, maka segala tindak kejahatan yang sebelumnya diancam dengan hukuman mati, akan tetap dihukum dengan ancaman hukuman lain sesuai dengan hukum yang berlaku. Dengan demikian, tidak hanya menjunjung hak asasi manusia, tetapi Protokol juga tidak memberi ruang untuk terjadinya *impunity*. Selain itu prinsip bahwa hak untuk hidup merupakan hak asasi manusia (sebagaimana dinyatakan dalam ICCPR) dalam Protokol lebih diperkuat dengan prinsip bahwa hak untuk hidup tidak dapat dikecualikan dengan hukuman mati.

Materi-materi Pokok (*Main Features*)

Pada dasarnya hanya ada satu materi pokok dari Protokol, yaitu penghapusan hukuman mati. Ketentuan tersebut membawa konsekuensi bahwa tidak seorangpun yang berada di yurisdiksi Negara Pihak boleh dihukum mati dan Negara Pihak harus melakukan segala cara untuk menghapuskan hukuman mati (Pasal 1). Ketentuan ini berlaku juga bagi seluruh wilayah negara federal (Pasal 9).

Selain reservasi yang bersifat teknis, reservasi hanya diperbolehkan untuk hukuman mati pada masa perang yang didasarkan pada pembuktian tindak kejahatan militer yang sangat serius yang dilakukan pada saat perang (Pasal 2 Ayat 1).

Mekanisme Khusus dan Peraturan Terkait

(Special Mechanism and Related Document)

Mekanisme pelaksanaan Protokol diintegrasikan dengan mekanisme dalam ICCPR. Dalam laporan yang dibuat oleh Negara Pihak mengenai langkah yang ditempuh untuk melaksanakan ICCPR, disertakan juga laporan mengenai langkah yang ditempuh untuk melaksanakan Protokol (Pasal 3). Mekanisme pelaporan ini dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam ICCPR.

Khusus bagi Negara Pihak yang membuat pernyataan mengenai kompetensi *Human Rights Committee* (HRC) untuk menerima dan mempertimbangkan pemberitahuan dari Negara Pihak mengenai Negara Pihak lain yang tidak memenuhi kewajibannya dalam ICCPR, juga berlaku bagi kewajiban dalam Protokol. Demikian juga bagi Negara Pihak yang juga merupakan Negara Pihak dalam *First Optional Protocol to the International Covenant on Civil and Political Rights* dalam hal kompetensi HRC untuk menerima dan mempertimbangkan pemberitahuan dari individu dalam yurisdiksi Negara Pihak, juga berlaku sebagai ketentuan Protokol (Pasal 6). (Haryo Budi Nugroho, S.H.)

Convention on the Right of the Child 1989⁶

Konsep

Convention on the Right of the Child/Konvensi tentang Hak-hak Anak (Konvensi) merupakan instrumen hukum mengikat yang untuk pertama kalinya mencakup keseluruhan hak asasi manusia yaitu hak sipil, budaya, ekonomi, politik, dan sosial. Pada dasarnya, Konvensi ini mengatur mengenai hak-hak anak yang harus dilindungi oleh negara dan langkah-langkah yang harus dilakukan oleh negara untuk menjamin hak-hak tersebut.

⁶www.unicef.org/crc/, www.unicef.org/crc/index_30197.html,
www.ohchr.org

Latar Belakang

Penegasan bahwa anak sebagai anggota masyarakat yang memerlukan perlakuan dan perlindungan khusus, telah dinyatakan dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan beberapa deklarasi lainnya. Akan tetapi, deklarasi tersebut hanya merupakan pernyataan moral dan bukan merupakan instrumen hukum yang mengikat. Pada 1989, para pemimpin dunia, melalui Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa, memutuskan bahwa anak-anak memerlukan konvensi khusus karena anak (di bawah 18 tahun) memerlukan perlakuan dan perlindungan khusus yang tidak diperlukan oleh orang dewasa. Akhirnya, Konvensi diadopsi oleh Majelis Umum PBB pada 20 November 1989.

Keberlakuan

Konvensi ini berlaku pada hari ketigapuluh sejak tanggal pendepositan instrumen ratifikasi atau aksesi yang keduapuluh kepada Sekretaris Jendral PBB (Pasal 49). Bagi negara yang meratifikasi atau mengaksesi setelah Konvensi berlaku, maka Konvensi berlaku bagi negara tersebut pada hari ketigapuluh sejak dilakukan pendepositan instrumen ratifikasi atau aksesi negara tersebut. Reservasi juga dimungkinkan dalam Konvensi ini sepanjang tidak bertentangan dengan objek dan tujuan Konvensi (Pasal 51).

Konvensi ini berlaku sejak 2 September 1990. Saat ini, terdapat 192 Negara Pihak dengan 140 negara yang menandatangani.

Prinsip Umum

Berdasarkan Konvensi ini, anak adalah semua orang yang berusia di bawah 18 tahun kecuali, berdasarkan hukum yang berlaku pada anak tersebut, batas usia ditentukan lebih muda (Pasal 1). Konvensi ini selain mengakui hak-hak dasar yang harus diberikan pada anak, juga mengatur bagaimana negara pihak dari Konvensi menetapkan regulasi untuk memberikan kepada anak hak-hak yang menjadi miliknya. Pengakuan hak-hak tersebut harus

dilakukan tanpa diskriminasi apapun dan negara pihak juga wajib untuk mengambil langkah-langkah untuk memastikan anak-anak terlindungi dari segala bentuk diskriminasi (Pasal 2).

Konvensi menekankan bahwa segala tindakan yang dilakukan yang berhubungan dengan anak harus berdasarkan kepentingan terbaik dari anak tersebut (*best interest of the child*) (Pasal 3 ayat (1)). Kemudian, Konvensi menekankan negara pihak untuk memastikan tersedianya perlindungan dan perawatan demi kesejahteraan anak dan perlindungan dan perawatan tersebut harus sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh badan yang berwenang (Pasal 3 ayat (2) dan (3)). Selain itu, Konvensi ini juga memperhatikan kondisi-kondisi yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak dan mengadakan pengaturan mengenai pengkondisian tersebut agar anak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik.

Materi Pokok

Konvensi ini memiliki tiga bagian yang terdiri dari 54 Pasal. Bagian Pertama mengatur mengenai hak-hak anak dan kewajiban Negara Pihak untuk menjamin hak-hak tersebut. Bagian Kedua mengatur mengenai mekanisme pengawasan khusus Konvensi melalui Komite Hak Anak (*Committee on the Rights of the Child*). Bagian Ketiga mengatur mengenai penandatanganan, keberlakuan dan pendepositan.

Konvensi mewajibkan negara pihak untuk mengambil langkah hukum, administrasi maupun langkah lain untuk menerapkan hak-hak yang terdapat dalam Konvensi; khusus untuk hak ekonomi, sosial, dan budaya Negara Pihak wajib mengusahakan semaksimal mungkin sesuai dengan sumber daya yang dimiliki, jika dibutuhkan, dalam kerangka kerja sama internasional (Pasal 4). Konvensi kemudian mengatur bahwa setiap negara pihak harus menghormati kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau anggota keluarga lainnya, sesuai dengan kebudayaan setempat, berkaitan dengan pelaksanaan hak-hak yang diakui oleh Konvensi (Pasal 5). Konvensi menjamin agar anak tidak dipisahkan dari orang tuanya kecuali terjadi

pelanggaran hak anak atau penelantaran (Pasal 9). Oleh karena itu, permohonan untuk masuk atau keluar dari negara pihak dengan tujuan untuk dapat berkumpul kembali dengan keluarga (*family reunification*) wajib disikapi secara positif, manusiawi dan dalam tempo sesingkat mungkin (Pasal 10). Berkaitan dengan pelintasan antarnegara ini, negara pihak berkewajiban untuk memerangi perpindahan ilegal dan tidak adanya akses untuk kembali dari luar negeri (Pasal 11). Kewajiban ini kemudian juga mencakup untuk mengambil langkah-langkah dalam skala nasional, bilateral, maupun multilateral untuk mencegah penculikan, perdagangan anak untuk tujuan dan dalam bentuk apapun (Pasal 35).

Selain menghormati kekuasaan orang tua, negara pihak juga wajib mengusahakan pengakuan prinsip bahwa kedua orang tua memiliki tanggung jawab dalam pengasuhan dan perkembangan anak (Pasal 18). Kewajiban bagi negara pihak untuk melindungi anak dari kekerasan fisik maupun mental selama dalam pengasuhan orang tua atau wali yang sah juga ditegaskan dalam Konvensi ini (Pasal 19). Terhadap anak yang tidak mendapatkan lingkungan keluarga, maka setiap negara pihak berkewajiban untuk memberi bantuan khusus berupa perawatan alternatif pada anak tersebut, diantaranya dengan cara pengangkatan anak, *kafalah* dalam hukum Islam, adopsi, atau penempatan di institusi perawatan anak yang sesuai (Pasal 20). Dalam kasus adopsi, negara pihak wajib memastikan bahwa adopsi telah disahkan oleh otoritas yang telah ditentukan yang telah menentukan adopsi dapat dilakukan mengingat status orang tua, saudara dan wali serta mendapat persetujuan mereka jika diperlukan. Jika diperlukan, adopsi antarnegara juga dapat dilakukan dengan memastikan standar adopsi nasional telah dipenuhi dan penempatan anak tersebut tidak menimbulkan keuntungan ekonomi bagi pihak yang terlibat (Pasal 21). Bagi anak yang berstatus sebagai pengungsi (*refugee*), negara pihak wajib memastikan anak tersebut mendapatkan perlindungan dan bantuan kemanusiaan untuk menikmati hak-hak anak dalam Konvensi ini dan dalam instrumen hak asasi atau humaniter lainnya (Pasal 22).

Kewajiban untuk melindungi anak mencakup perlindungan dari penggunaan obat ilegal dan psikotropika, serta bahan-bahan lain, guna mencegah anak-anak terlibat dalam pembuatan dan perdagangan ilegal bahan-bahan tersebut (Pasal 33). Selain itu, Negara Pihak juga wajib melindungi anak dari segala bentuk eksploitasi dan kekerasan seksual (Pasal 34), serta eksploitasi apapun yang dapat membuat anak menjadi tidak sejahtera (Pasal 36).

Hak-hak dasar anak yang ditegaskan dalam Konvensi diantaranya adalah hak untuk hidup (Pasal 6), hak mendapatkan nama, kewarganegaraan, didaftarkan ketika dilahirkan, hak untuk mengetahui dan dirawat oleh orang tuanya (Pasal 7), hak untuk melindungi identitasnya (Pasal 8), hak menyatakan pandangannya sesuai kemampuannya (Pasal 12), hak untuk mengekspresikan diri dan memperoleh informasi (Pasal 13), kebebasan berpendapat, moral, dan agama (Pasal 14), kebebasan untuk berserikat dan berkumpul (Pasal 15). Salah satu cara untuk memastikan hak atas informasi diperoleh dengan adanya pengakuan dari Negara Pihak terhadap peranan penting dari media masa dan adanya tindakan yang memastikan bahwa anak mendapatkan akses terhadap informasi tersebut dari berbagai sumber, baik nasional maupun internasional (Pasal 17). Hak-hak dasar lain yang juga ditegaskan dalam Konvensi adalah hak untuk tidak menjadi subyek perlakuan atau penghukuman yang kejam dan tidak manusiawi, hak untuk tidak dikurangi kebebasannya dan ditangkap secara tidak sesuai dengan hukum atau semena-mena, diperlakukan secara manusiawi selama dalam penahanan, dan hak atas akses yang cepat terhadap hukum dan bantuan lainnya (Pasal 37).

Konvensi memberikan perhatian khusus bagi anak yang cacat secara mental maupun fisik, terutama hak-hak mereka untuk mendapatkan perawatan khusus, seperti mendapatkan pendidikan, pelatihan, pelayanan kesehatan, rehabilitasi, persiapan kerja, dan rekreasi dengan cara yang kondusif agar anak tersebut dapat mencapai integrasi sosial dan pengembangan individu yang maksimal (Pasal 23). Hak lain yang memperoleh perhatian khusus adalah hak atas kesehatan, dimana Konvensi mewajibkan negara

untuk mengambil langkah untuk menghilangkan kematian bayi dan anak, menjamin pelayanan kesehatan anak, memerangi penyakit dan malnutrisi, menjamin pelayanan kesehatan yang layak bagi ibu sebelum dan setelah melahirkan, menjamin akses informasi bagi masyarakat mengenai kesehatan dan nutrisi bagi anak, dan mengembangkan sistem pencegahan penyakit (preventif) dan keluarga berencana (Pasal 24). Negara Pihak juga wajib untuk mengkaji kembali perlakuan dan penempatan anak-anak yang berada dalam perawatan khusus karena kondisi mental dan fisik mereka (Pasal 25).

Dalam Konvensi, anak-anak juga memiliki hak atas jaminan sosial dan hak atas kehidupan yang layak dan memadai untuk perkembangan fisik, mental, spiritual, moral dan sosial (Pasal 26 dan Pasal 27). Mengenai hak atas pendidikan, Konvensi mewajibkan Negara Pihak untuk memberikan pendidikan dasar yang wajib dan gratis, mendukung perkembangan pendidikan lanjutan yang bervariasi, dan pendidikan tinggi yang dapat diakses semua anak berdasarkan kemampuannya (Pasal 28). Pendidikan ini diarahkan untuk mengembangkan kepribadian, bakat dan kemampuan fisik serta mental, serta perkembangan sehubungan dengan hak asasi dan kebebasan dasar (Pasal 29 ayat (1) a dan b). Pendidikan juga ditujukan untuk perkembangan anak sehubungan dengan identitas budaya, bahasa dan nilai-nilai dari orang tua anak tersebut serta persiapan anak untuk hidup dengan bertanggung jawab di masyarakat dan perkembangan dalam kaitannya dengan lingkungan kehidupannya (Pasal 29 ayat (1) c, d, dan e). Khusus bagi negara dimana terdapat kelompok minoritas etnik, agama, bahasa atau penduduk asli, anak dari kelompok tersebut tidak boleh dilanggar hak untuk menikmati, mempraktekan maupun berprofesi berdasarkan agama maupun bahasanya (Pasal 30).

Konvensi juga mengakui hak anak untuk beristirahat dan bersenang-senang yang pada initinya memberikan hak bagi anak untuk menikmati masa kanak-kanaknya (Pasal 31). Oleh karena itu, anak harus dilindungi dari eksploitasi ekonomi, terlebih yang mengganggu pertumbuhan dan perkembangan anak (Pasal 32). Anak juga tidak diperbolehkan untuk ambil bagian dalam peperangan

(Pasal 38), namun batasan usia untuk direkrut sebagai anggota angkatan bersenjata adalah 15 tahun. Terhadap anak yang menjadi korban, maka negara wajib untuk mengadakan pemulihan dan pengintegrasian sosial agar anak tersebut mendapatkan haknya sesuai Konvensi (Pasal 39). Terakhir, diberikan batasan hukuman bagi anak yang melanggar ketentuan hukum pidana (Pasal 40).

Mekanisme Khusus

Guna menjamin diterapkannya Konvensi ini, tidak hanya Negara Pihak wajib memasukan ketentuan-ketentuan tertentu dalam hukum nasionalnya, tetapi juga terdapat Komite Hak-hak Anak (*Committee on the Rights of the Child*) yang bertugas menerima laporan mengenai perkembangan penerapan hak-hak anak di masing-masing negara pihak (Pasal 43 dan Pasal 44). Kerja sama internasional dengan badan-badan lain melalui Komite juga dimungkinkan (Pasal 45). (Haryo Budi Nugroho, S.H.)